

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi dipahami sebagai proses peningkatan pendapatan per kapita yang di dalamnya mensyaratkan penciptaan dan perluasan kesempatan kerja secara inklusi (Todaro & Smith, 2011). Pembangunan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari peran manusia dalam proses pengelolaannya. Sumber daya manusia berperan sebagai tenaga kerja, faktor input, sekaligus sebagai pihak yang menerima manfaat dari hasil pembangunan tersebut. Dalam konteks regional, kawasan Asia Tenggara, yang terhimpun dalam *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) sesungguhnya memiliki basis sumber daya manusia yang sangat potensial, dengan populasi lebih dari 693 juta jiwa (*World Bank, 2025*). Besarnya populasi ini bukan sekadar angka statistik, melainkan representasi dari potensi tenaga kerja yang dimiliki. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya termanfaatkan khususnya karena kontribusi ekonomi perempuan, yang merupakan separuh dari sumber daya manusia kawasan ini, masih terhambat secara struktural.

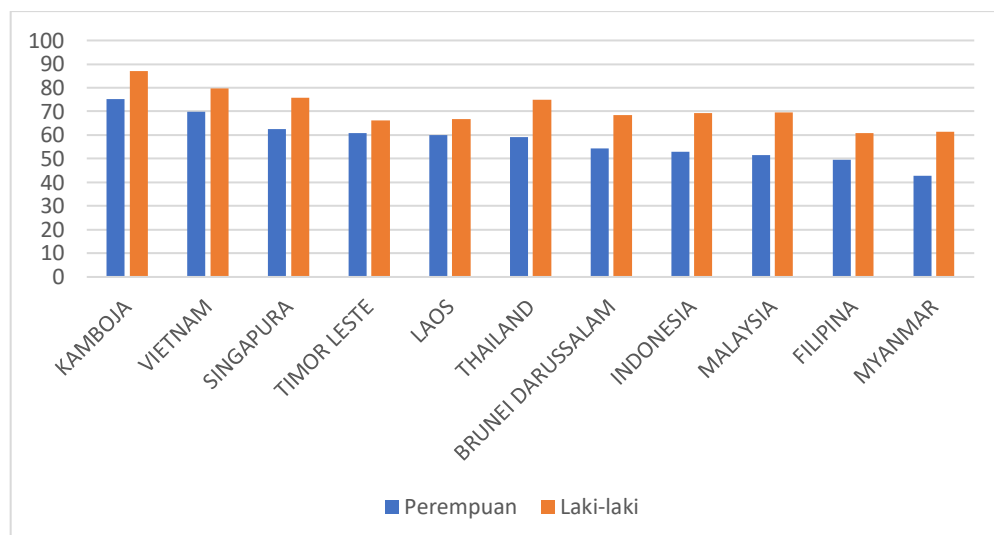
Komposisi gender dalam angkatan kerja merupakan dimensi krusial yang menentukan sejauh mana potensi demografis ASEAN dapat dioptimalkan. Secara statistik, proporsi jumlah penduduk ASEAN relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan, bahkan di beberapa wilayah ASEAN menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan melebihi populasi laki-laki (*World Bank, 2025*). Namun kesetaraan jumlah ini tidak tercermin dalam kesetaraan partisipasi ekonomi. Keterlibatan perempuan dalam pasar kerja, yang diukur melalui Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja (TPAK) perempuan, justru menjadi salah satu indikator paling kritis yang mencerminkan kesenjangan struktural di kawasan ini (Anannty *et al.*, 2025).

Realitas di kawasan ASEAN menunjukkan kondisi yang kontradiktif. Meskipun partisipasi perempuan secara agregat tampak cukup besar, sekitar 69% perempuan yang bekerja masih terserap di sektor informal, dan 20% berstatus sebagai pekerja keluarga tak dibayar jauh di atas laki-laki yang hanya 7%. Dominasi sektor informal ini menyebabkan perempuan kehilangan akses terhadap perlindungan sosial dasar seperti jaminan kesehatan, tunjangan pengangguran, serta cuti melahirkan. Fenomena ini sejalan dengan temuan empiris oleh studi Mahbuba & Setyowati (2023) yang menunjukkan bahwa kesenjangan partisipasi antara laki-laki dan perempuan masih tetap terjadi di kawasan ASEAN. Urgensi permasalahan ini semakin dikuatkan oleh data kelembagaan skor *Social Institutions and Gender Index* (SIGI) 2024 menempatkan Asia Tenggara pada tingkat diskriminasi sebesar 39 kategori sedang-tinggi, di atas rata-rata dunia sebesar 29 sementara kerangka hukum di kawasan ini hanya mencapai skor 57,8, tertinggal dari rata-rata global sebesar 64,2. Ini mengonfirmasi bahwa di balik pertumbuhan ekonomi ASEAN yang pesat, hambatan institusional masih secara sistematis membatasi ruang gerak perempuan di pasar kerja.

Dinamika ini dapat dipahami secara sistematis melalui *Labor Market Segmentation Theory* (Doeringer & Piore, 1970), yang memandang pasar tenaga kerja bukan sebagai struktur homogen, melainkan terdualistik menjadi dua sektor yang terpisah, yaitu sektor primer ditandai upah layak, jaminan kerja, dan jenjang

karir dan sektor sekunder yang identik dengan upah rendah, kondisi kerja buruk, dan ketidakstabilan tinggi. Dalam konteks ASEAN, beban domestik yang secara kultural masih dibebankan pada perempuan menciptakan ketidakcocokan struktural dengan tuntutan rigiditas sektor primer. Akibatnya, perempuan cenderung terjebak (*crowded*) di sektor sekunder menerima pekerjaan rentan atau menjadi pekerja keluarga tanpa upah demi fleksibilitas waktu. Hal ini dikonfirmasi oleh temuan Firmansyah & Purnomo (2024), di mana hambatan domestik memaksa perempuan menerima pekerjaan berstatus rentan atau menjadi pekerja keluarga tanpa upah demi fleksibilitas waktu yang merupakan karakteristik utama sektor sekunder. Kondisi inilah yang pada akhirnya menekan angka partisipasi perempuan, karena sektor sekunder seringkali tidak tercatat dengan baik atau memiliki insentif ekonomi yang terlalu rendah untuk menarik lebih banyak perempuan masuk ke pasar kerja. Kondisi kesenjangan partisipasi angkatan kerja tersebut divisualisasikan secara jelas pada gambar di bawah ini :

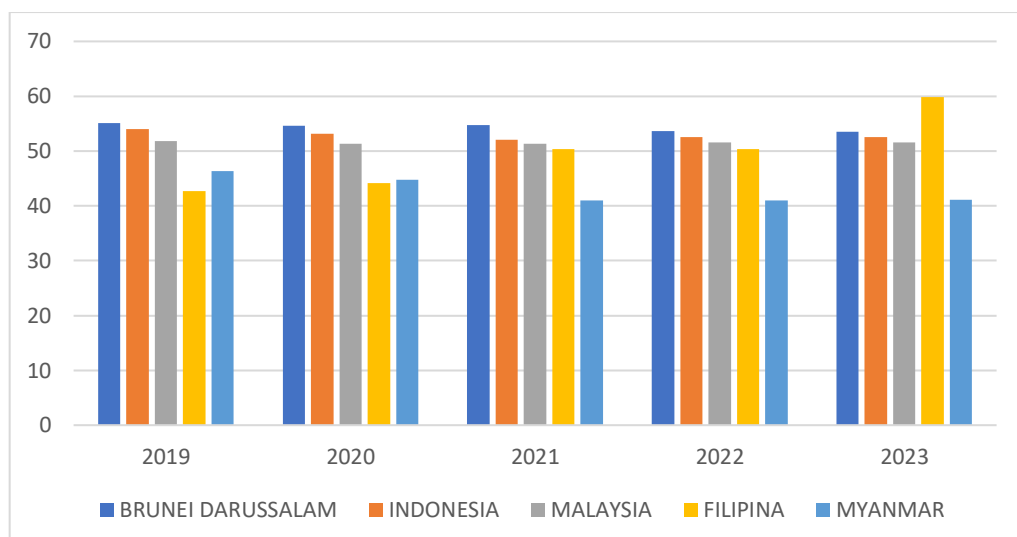


Sumber : World Bank, diolah (2025)

Gambar 1.1 Perbandingan Rata-rata Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Negara ASEAN 5 Tahun Terakhir (persen)

Berdasarkan gambar 1.1 di atas, data menunjukkan adanya perbedaan yang jelas antara tingkat partisipasi laki-laki dan perempuan di kawasan ASEAN. Selama lima tahun terakhir, rata-rata TPAK laki-laki konsisten berada di level yang tinggi di atas 75%, sementara TPAK perempuan tertahan di level yang jauh lebih rendah kisaran 40-50%. Kesenjangan yang stabil ini mengindikasikan bahwa hambatan struktural bagi perempuan untuk masuk ke pasar kerja masih sangat kuat di kawasan ASEAN.

Fenomena ini paling nyata terlihat pada lima negara yang secara konsisten menempati posisi TPAK perempuan terendah di ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Myanmar, dan Brunei Darussalam yang secara konsisten menempati posisi sebagai lima negara dengan TPAK perempuan terendah (*The Bottom Five*) di kawasan ASEAN. Rata-rata TPAK perempuan di kelima negara ini hanya berkisar 42%-54% *World Bank (2025)*, jauh di bawah Vietnam maupun Singapura. seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini:



Sumber : World Bank, diolah (2025)

Gambar 1.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan ASEAN-5 Tahun 2019-2023 (persen)

Berdasarkan gambar 1.2 di atas, Brunei Darussalam meskipun berstatus *High Income Country*, justru mengalami tren penurunan partisipasi angkatan kerja perempuan dari 55,05% pada 2019 menjadi 53,53% pada 2023, mengindikasikan bahwa tingginya pendapatan per kapita tidak serta-merta menjamin inklusifitas pasar kerja bagi perempuan. Pola stagnasi terlihat pada Indonesia dan Malaysia, dengan rata-rata partisipasi masing-masing sebesar 52,86% dan 51,55%. Sementara, Myanmar menjadi negara dengan TPAK perempuan terendah di antara lima negara penelitian, hanya sebesar 41,06 persen pada tahun 2023. Rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di lima negara ASEAN mengindikasikan bahwa dinamika pasar tenaga kerja perempuan tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh respon sosial masyarakat terhadap peran perempuan dan kecocokan struktur pekerjaan dengan peran domestik (Shittu & Abdullah, 2018).

Dalam kerangka teori segmentasi pasar tenaga kerja, variabel pertama yang secara struktural menentukan akses perempuan ke pasar kerja formal adalah tingkat fertilitas. *Role Incompatibility Hypothesis* yang diuraikan oleh Shittu & Abdullah (2018) dalam penelitiannya di ASEAN menegaskan bahwa konflik antara peran reproduktif (pengasuhan) dan produktif (bekerja) menjadi semakin tajam pada pekerjaan sektor primer yang menuntut kehadiran fisik penuh dan komitmen waktu yang rigid. Akibatnya, perempuan dengan fertilitas tinggi cenderung terdorong keluar dari pasar kerja formal, atau sejak awal tidak masuk ke dalamnya.

Studi Mahbuba & Setyowati (2023) serta Firmansyah & Purnomo (2024) mengonfirmasi pengaruh negatif dan signifikan fertilitas terhadap TPAK

perempuan di ASEAN, bahwa setiap penambahan jumlah anak akan meningkatkan beban domestik yang mendorong perempuan keluar dari pasar kerja. Namun konsensus ini tidak sepenuhnya konklusif. Audiena Al Faziah *et al.* (2025) justru menemukan pengaruh positif antara fertilitas dan partisipasi kerja. Anomali ini dijelaskan melalui argumen *Economic Necessity*, di mana banyak anak justru memaksa ibu bekerja demi membiayai kebutuhan keluarga, meski harus menerima pekerjaan informal yang fleksibel namun berupah rendah. Inkonsistensi arah pengaruh fertilitas ini merupakan celah empiris pertama yang mendorong penelitian ini.

Di sisi struktur pasar kerja, variabel kedua yang dianalisis adalah proporsi pekerja perempuan penerima upah dan gaji yang menjadi indikator ketersediaan pekerjaan formal dalam perekonomian. Dalam perspektif segmentasi, variabel ini berperan sebagai *pull factor* yaitu keberadaan pekerjaan formal berupa meningkatkan *opportunity cost* dari keputusan tidak bekerja, sehingga menarik perempuan keluar dari sektor sekunder Firmansyah & Purnomo (2024). Pekerjaan formal menawarkan jaminan pendapatan, perlindungan administratif, dan jenjang karir yang tidak tersedia di sektor informal insentif yang secara teoritis mendorong peningkatan TPAK perempuan. Namun, ekspansi sektor formal tidak otomatis meningkatkan TPAK perempuan secara agregat. Mengacu pada temuan Herlina Sari *et al.* (2024), mencatat bahwa apabila persyaratan pekerjaan formal terlalu rigid tidak mengakomodasi fleksibilitas yang dibutuhkan perempuan dengan beban domestik maka pertumbuhan sektor berupa justru dapat menciptakan *reservation*

wage yang terlalu tinggi dan mempersulit akses perempuan. Inkonsistensi ini menjadi celah empiris kedua yang perlu diuji dalam konteks ASEAN-5.

Disparitas antara ketersediaan pekerjaan formal dan kemampuan perempuan untuk mengaksesnya erat kaitannya dengan kualitas modal manusia. Variabel ketiga, rata-rata lama sekolah perempuan (*Mean Years of Schooling*), dianalisis melalui *Human Capital Theory* (Becker, 1964) yang memandang pendidikan sebagai investasi yang meningkatkan produktivitas dan memperluas akses ke pekerjaan layak sehingga berkorelasi positif dengan TPAK. Asumsi ini dikonfirmasi oleh studi Shuangshuang *et al.* (2023) pada negara-negara BRICS dan Resti Restiana & Asnita Frida B.R. Sebayang (2025) di Indonesia, yang menemukan pengaruh positif dan signifikan antara pendidikan dan partisipasi kerja. Hal ini membuktikan bahwa peningkatan pendidikan berkorelasi linear dengan peningkatan partisipasi kerja perempuan karena terbukanya akses ke pekerjaan yang lebih layak.

Namun prediksi teori modal manusia tidak selalu terbukti di negara berkembang. Studi terbaru oleh Audiena Al Faziah *et al.* (2025) justru menemukan hubungan negatif dimana semakin tinggi pendidikan perempuan, semakin rendah partisipasinya di pasar kerja. Dalam struktur pasar yang tersegmen, peningkatan pendidikan secara otomatis menaikkan *reservation wage* ekspektasi upah dan status pekerjaan minimum yang diterima. Apabila pasar kerja tidak menyediakan pekerjaan yang sebanding dengan kualifikasi tersebut, perempuan berpendidikan tinggi justru lebih selektif dan cenderung menunggu atau menghindari pasar kerja.

Ambiguitas arah pengaruh pendidikan ini merupakan celah empiris ketiga yang perlu diuji secara dinamis.

Selain pendidikan, kesehatan merupakan komponen integral *human capital* yang menentukan kapasitas fisik dan durasi produktif tenaga kerja (Becker, 1994). Variabel keempat, angka harapan hidup perempuan, menjadi proksi kualitas kesehatan yang secara teoritis berkorelasi positif dengan TPAK, dimana perempuan yang lebih sehat memiliki produktivitas lebih tinggi, risiko absensi lebih rendah, dan lebih kompetitif di sektor primer. Konsensus empiris dari Sajati & Pujiati (2025), Audiena Al Faziah *et al.* (2025), serta Firmansyah & Purnomo (2024) mengonfirmasi pengaruh positif signifikan angka harapan hidup terhadap TPAK perempuan di ASEAN. Namun, melalui kerangka teori penawaran tenaga kerja yang memandang hubungan antara kesehatan dan partisipasi kerja tidak bersifat searah, melainkan ditentukan oleh interaksi antara efek substitusi dan efek pendapatan. Peningkatan angka harapan hidup pada awalnya meningkatkan produktivitas dan kapasitas kerja atau efek substitusi, yang seharusnya mendorong partisipasi perempuan ke pasar kerja. Namun dalam jangka panjang, perbaikan kesehatan juga meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi rumah tangga, sehingga menimbulkan dampak pendapatan menurunkan tekanan ekonomi untuk bekerja. Asumsi ini sejalan dengan penelitian oleh Mushtaq *et al.* (2013), dimana peningkatan status kesehatan dalam rumah tangga sering kali meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga secara keseluruhan, yang pada pasangannya dapat mengurangi desakan bagi perempuan untuk berpartisipasi di pasar kerja, terutama

jika struktur sosial masih menempatkan perempuan sebagai pengelola utama domestik.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa TPAK perempuan di 5 negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Myanmar, dan Brunei Darussalam) masih menghadapi stagnasi dan tertinggal dibandingkan negara tetangga. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks dengan adanya kesenjangan empiris dari studi terdahulu yang menunjukkan hasil inkonsisten. Sebagai bukti empiris, penelitian Nawalin *et al.* (2021) menunjukkan bahwa pendidikan perempuan tidak memiliki dampak signifikan dalam jangka pendek, namun berpengaruh signifikan dalam jangka panjang. Sebaliknya, Fertilitas ditemukan tidak berdampak signifikan dalam jangka panjang, namun berpengaruh negatif dalam jangka pendek. Merespons hasil inkonsisten tersebut, penelitian ini dilakukan menggunakan metode Panel ARDL (*Autoregressive Distributed Lag*). Metode ini mampu memisahkan respons jangka pendek dan keseimbangan jangka panjang, sehingga dapat memberikan solusi atas inkonsistensi temuan. Literatur yang menerapkan pendekatan dinamis Panel ARDL dengan kombinasi spesifik keempat variabel tersebut pada konteks ASEAN-5 masih tergolong terbatas (*limited literature*), keterbatasan literatur ini menegaskan bahwa penggunaan metode Panel ARDL dengan kombinasi variabel tersebut masih tergolong baru (*state of the art*) dan belum banyak dieksplorasi, khususnya pada objek negara di kawasan ASEAN-5. Sehingga, penelitian ini disusun dengan judul: **Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di 5 Negara ASEAN Tahun 1994-2023.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengidentifikasi masalah yang dihadapi sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh jangka pendek tingkat fertilitas, pekerja perempuan penerima upah dan gaji, rata-rata lama sekolah perempuan, dan angka harapan hidup perempuan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di 5 negara ASEAN periode 1994-2023?
2. Bagaimana pengaruh jangka panjang tingkat fertilitas, pekerja perempuan penerima upah dan gaji, rata-rata lama sekolah perempuan, dan angka harapan hidup perempuan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di 5 negara ASEAN periode 1994-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaruh jangka pendek tingkat fertilitas, pekerja perempuan penerima upah dan gaji, rata-rata lama sekolah perempuan, dan angka harapan hidup perempuan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di 5 negara ASEAN periode 1994-2023.
2. Pengaruh jangka panjang tingkat fertilitas, pekerja perempuan penerima upah dan gaji, rata-rata lama sekolah perempuan, dan angka harapan hidup perempuan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di 5 negara ASEAN periode 1994-2023.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis yang signifikan terhadap pengembangan literatur ekonomi pembangunan dan ekonomi ketenagakerjaan, khususnya dalam konteks regional ASEAN. Secara empiris, studi ini berhasil mengidentifikasi pola determinan TPAK perempuan yang berdimensi ganda antara jangka pendek dan jangka panjang melalui pendekatan Panel *Autoregressive Distributed Lag* (Panel ARDL) dengan cakupan data tiga dekade (1994-2023) pada lima negara ASEAN dengan tingkat partisipasi perempuan terendah (*the bottom five*) yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Myanmar, dan Brunei Darussalam. Dalam jangka panjang, hasil estimasi menunjukkan bahwa tingkat fertilitas, rata-rata lama sekolah perempuan, dan angka harapan hidup perempuan masing-masing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap TPAK perempuan, sementara variabel Pekerja perempuan penerima upah dan gaji berpengaruh positif dan signifikan. Adapun dalam jangka pendek, hanya tingkat fertilitas dan angka harapan hidup perempuan yang menunjukkan pengaruh negatif signifikan secara langsung, sedangkan variabel rata-rata lama sekolah dan upah-gaji belum menunjukkan pengaruh yang signifikan mengindikasikan adanya *time lag* dalam transmisi efek modal manusia dan formalisasi pasar kerja terhadap perilaku penawaran tenaga kerja perempuan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan memberikan kesempatan untuk memperdalam pemahaman dan mengaplikasikan teori-teori ekonomi pembangunan serta ekonomi ketenagakerjaan dalam menganalisis fenomena partisipasi angkatan kerja perempuan. Tidak hanya itu, penelitian ini juga digunakan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana pada Jurusan Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan empiris (*evidence-based policy*) bagi pemerintah di 5 negara ASEAN dalam merumuskan strategi ketenagakerjaan yang inklusif dan responsif gender, khususnya terkait formalisasi lapangan kerja dan penyediaan fasilitas pendukung bagi pekerja perempuan.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan utama bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mendalami isu rigiditas pasar tenaga kerja di negara berkembang. Penggunaan model dinamis dalam studi ini memberikan wawasan baru mengenai pentingnya dimensi waktu (*time lag*) dalam kebijakan ketenagakerjaan, sehingga dapat memicu penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai variabel struktural lain yang belum terakomodasi dalam model ini.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lingkup wilayah di lima negara anggota ASEAN yang menjadi objek studi, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Myanmar, dan

Brunei Darussalam. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berbentuk data panel yang menggabungkan data silang tempat (*cross-section*) di lima negara tersebut dan data runtun waktu (*time series*) selama periode 1994–2023. Seluruh data variabel, yang meliputi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan, tingkat fertilitas, pekerja penerima upah dan gaji perempuan, rata-rata lama sekolah perempuan, serta angka harapan hidup perempuan diperoleh dari publikasi resmi lembaga internasional yang kredibel, yaitu *World Development Indicators* (WDI) dari World Bank dan *United Nations Development Programme* (UNDP).

1.5.2 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini dibuat sebagai matriks acuan agar penelitian dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Penelitian ini dimulai pada bulan Oktober 2025 diawali dengan melakukan pengajuan judul kepada pihak program studi Ekonomi Pembangunan. Pelaksanaan penelitian ini melibatkan kegiatan interaktif antara peneliti dan pembimbing, dengan keterlibatan penguji. Berikut merupakan jadwal penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

